

PEMUDA NU DALAM PUSARAN WACANA ANTI KOMUNISME: Sebuah Pergolakan Ideologi

Imamul Huda Al Siddiq dan Ahmad Arif Widiyanto

Universitas Negeri Malang

Alamat Email:

imamul.huda.fis@um.ac.id; ahmad.arif.fis@um.ac.id

Abstract

This paper aims to examine the idealized upheaval of NU youth in addressing the anti-communism discourse. This article was written by critically examining pre-existing scientific texts to expose ideological upheaval among NU youth sociologically. In one hand, this article argues that NU youth have a significant contribution in maintaining the integrity of the Republic of Indonesia, which is started from the abolishment of the PKI, as well as other efforts to defend Indonesia. On the other hand, they also have concern for oppressed groups including former 1965 political prisoners and their families. They were smart in fighting for the rights of former political prisoners in 1965, even though in the past they had also suppressed and became victims of the PKI. the discourse was responded differently by NU youths. Some of them consider it a form of humanism, while the others more see it as a bad idea, and some even consider it as an extreme behavior.

Keywords: NU's Youth, Anti-Communism Discourse, Ideological Upheaval, Communicative Action

Intisari

Peran pemuda NU sebagai kepanjangan tangan dari para kyai NU begitu besar dalam pemberantasan partai dan ideologi terlarang seperti PKI. Dengan menggunakan prinsip dasar Nahdlatul Ulama seperti tawasuth, tawazun, i'tidal, dan tasamuh, ditambah pijakan berpikir dan bertindak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada pada ushul fiqh serta petunjuk dari para kyai, pemuda NU

dengan mantap menyatakan perang dengan komunisme. Begitu pula ketika mereka membela hak-hak dari mantan aktivis Komunis atau yang dianggap Komunis dan keluarganya dengan menggunakan prinsip tersebut. Tulisan ini bertujuan mengkaji pergolakan ideologi di kalangan pemuda NU dalam menyikapi wacana anti-komunisme. Artikel ini ditulis dengan menelaah secara kritis teks-teks ilmiah yang telah ada sebelumnya untuk menganalisis pergolakan ideologi di kalangan pemuda NU secara sosiologis. Kesimpulannya pemuda NU dengan berdasar prinsip yang ada memiliki andil besar dalam mempertahankan keutuhan NKRI, mulai dari pemberantasan PKI, serta upaya-upaya mempertahankan Indonesia. Di sisi lain, mereka juga memiliki perhatian terhadap kelompok tertindas termasuk mantan tahanan politik 1965 dan keluarganya. Mereka begitu gigih memperjuangkan hak-hak mantan tahanan politik 1965 meski di masa lalu mereka pula yang memberangus PKI sampai ke akarnya. Salah satu wacana yang mengemuka berkaitan dengan wacana anti-komunisme yaitu wacana rekonsiliasi antara golongan NU dan Komunisme. Wacana tersebut ditanggapi berbeda-beda oleh pemuda NU. Ada yang menganggapnya sebagai bentuk sifat humanis, adapula yang melihatnya sebagai gagasan buruk, bahkan ada yang memandang rekonsiliasi tersebut sebagai langkah ekstrim.

Kata Kunci: Pemuda NU, Wacana Anti-Komunisme, Pergolakan Ideologi, Tindakan Komunikatif

Pendahuluan

Petikan pidato inaugurasi Max Weber di atas menggambarkan gejala seorang kawula muda tentang kondisi di sekitarnya dan kehausan terhadap perubahan yang dicita-citakan. Pidato tersebut sebagai berikut:

“Apakah artinya hidup sebagai angkatan muda yang selalu dibayangi oleh kebanggaan generasi yang lebih tua tentang keagungan hasil yang mereka capai, yaitu kesatuan Jerman? Apakah generasi sesudah itu hanya pengekor, epigon yang harus menerima pewarisan?” (Pidato Inaugurasi Max Weber).¹

Tampaknya, gejala kaum muda di atas juga tersirat dalam tubuh Nahdatul Ulama (NU), organisasi sosial-keagamaan di

1 Taufik Abdullah, *Pemuda dan Perubahan Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1974).

Indonesia. Gejala itu muncul dilatarbelakangi oleh adanya pro-kontra terhadap wacana anti komunisme yang semakin menguat di kalangan NU sehingga terjadi polarisasi sikap dan pandangan antara generasi muda-tua. Pro-kontra tersebut menguat ketika wacana anti-komunisme dan rekonsiliasi dengan PKI yang dikaitkan dengan NU gencar diberitakan dan menjadi perdebatan nasional.²

Sejarah telah mencatat bagaimana peran NU dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Resolusi Jihad yang diinisiasi oleh KH. Hasyim Asyari telah mampu menggugah hati dan menggerakkan seluruh pemuda ketika itu untuk ikut mengangkat senjata dan menyatakan perang dengan penjajah demi merebut kemerdekaan Indonesia. Munculnya resolusi jihad tidak dapat dilepaskan dari rangkaian peristiwa yang ada sebelumnya.³ Mulai ketika Jepang menyerah kepada sekutu sehingga terdapat kekosongan kekuasaan di Indonesia. Waktu itulah Indonesia memanfaatkan momen kekosongan kekuasaan tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sementara, sekutu yang telah menang dari Jepang berkeinginan untuk melakukan infiltrasi ke dalam Indonesia untuk mengagalkan upaya kemerdekaan Indonesia. Karena inilah patriotisme dari kalangan pemuda tumbuh. Para pemuda terbakar semangatnya karena pintu kemerdekaan sudah di depan mata, dan tidak ingin kemerdekaan tersebut direbut lagi oleh tentara sekutu. Sehingga ketika KH Hasyim Asyari menginisiasi resolusi jihad, ketika Bung Tomo memekikkan takbir dan kata merdeka, para pemuda dengan suka rela mengorbankan jiwa raganya untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut, termasuk di dalamnya para pemuda Nahdlatul Ulama.

Begitu pula ketika terdapat pemberontakan PKI, NU berada pada garis terdepan untuk menjaga NKRI. Peran NU dan Ansor mempertahankan keutuhan NKRI tersebut terekam dalam catatan sejarah bangsa Indonesia. Catatan sejarah membuktikan bahwa NU

2 Idealisa Masyrafina dan Teguh Firmansyah, "Disebut Dokumen AS Menumpas Anggota PKI, Ini Jawaban NU," *Republika Online*, 21 Oktober 2017, <https://republika.co.id/share/oy5dfz377>; Arman Dhani, "NU dan Rekonsiliasi 65 « IndoPROGRESS," *indoprogress.com*, 2 Agustus 2015, <https://indoprogress.com/2015/08/nu-dan-rekonsiliasi-65/>; Roy Murtadho, "NU di Masa 65 (Bagian 1) [i]," *islambergerak.com*, 27 November 2014, <http://islambergerak.com/2014/11/nu-di-masa-65-bagian-1/>; Islahudin, "NU Tak Terima Dicap Sebagai Pembantai PKI," *merdeka.com*, 10 Desember 2013, <https://www.merdeka.com/peristiwa/nu-tak-terima-dicap-sebagai-pembantai-pki.html>; Sri Lestari, "Pro kontra permintaan maaf kepada korban tragedi 1965 - BBC News Indonesia," *bbc.com*, 27 September 2015, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150925_indonesia_lapsus_pemerintah_maaf.html.

3 Abdul Latif Bustami, *Resolusi Jihad (Perjuangan Ulama: Dari Menegakkan Agama Hingga Negara)* (Jombang: Pustaka, 2015).

dengan pemudanya ikut andil bersama TNI dalam memberantas ideologi komunisme tersebut. Antara tahun 1965 hingga 1966 banyak pergesekan antara pemuda NU dengan simpatisan PKI yang terjadi sebagaimana yang diceritakan oleh buku benturan NU dan PKI. Pada tahun 1948, PKI melakukan pemberontakan di Madiun dan sekitarnya, ribuan santri dan ulama dibunuh serta pesantren dan masjid dibakar. Pada tahun 1949 PKI melakukan pembakaran Masjid Agung Trenggalek, imam dan takmir masjid beserta jama'ah masjid tersebut disiksa. Pada tahun 1951 PKI menyerbu markas Brimob Jakarta Utara dan gedung Pendidikan Nasional Bogor, 80 orang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. PKI juga menyerbu Masjid Agung Kembangkuning Surabaya pada tahun 1962 Al-Qur'an dan kitab-kitab lainnya pada masjid peninggalan Sunan Ampel tersebut diinjak-injak dan dibakar. Tahun 1963 PKI melakukan penghinaan terhadap agama dengan mementaskan reog, ludruk serta ketoprak dengan lakon matinya Tuhan sehingga karena pertunjukkan itu, perkelahianpun tidak bisa terelakkan. PKI melakukan aksi sepihak merebut tanah rakyat dan pemerintah sehingga terjadi pertumpahan darah, dan kalangan NU menjadi korban pada peristiwa yang terjadi pada tahun 1964. Dan pada tahun 1965 PKI melakukan kudeta berdarah yang berusaha mengganti Negara Pancasila dengan Negara Komunis.⁴

Serangkaian peristiwa di atas menunjukkan adanya benturan NU vs PKI yang turut mewarnai dinamika sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Gambaran benturan tersebut bahkan mendorong pengurus NU untuk mendokumentasikannya dalam sebuah buku berjudul " Benturan NU vs PKI 1948-1965" yang diterbitkan pada tahun 2013 di gedung PBNU. Buku ini merupakan reaksi pihak NU terhadap provokasi dari pihak yang menyudutkan NU sebagai pelaku tragedi 1965 atau peristiwa G 30 S/PKI. Pihak NU terutama Banser dituduh terlibat dalam tragedi tersebut. Oleh karena itu, buku tersebut dihadirkan sebagai klarifikasi pihak NU berdasarkan kajian terhadap peristiwa terkait PKI mulai 1926, 1948-1965.⁵ Pihak NU berusaha membersihkan diri dari tuduhan-tuduhan bahwa NU sebagai aktor pembantaian aktivis dan keluarga PKI pada 1965-1966. Meskipun faktanya kalangan NU bersikap anti-komunisme bahkan menyebut PKI sebagai kelompok *bughot* (subversif).

4 Abdul Mun'im, *Benturan NU & PKI 1948 - 1965* (Depok: Langgar Swadaya Nusantara, 2004).

5 Abdullah Alawi, "Buku 'Benturan NU-PKI' Jelaskan Sejarah dari Perspektif NU | NU Online," *nu.or.id*, 9 Desember 2013, <http://www.nu.or.id/post/read/48656/buku-quotbenturan-nu-pkiquot-jelaskan-sejarah-dari-perspektif-nu>.

Namun, sikap anti-komunisme dari pihak NU (generasi tua) tersebut ditanggapi oleh generasi muda yang kemudian menjadi polemik di internal NU. Salah satu bentuk tanggapan sebagaimana dimuat dalam artikel di media on-line yang ditulis oleh pemuda NU progresif.⁶ Setidaknya ada 4 (empat) kritik yang dilontarkan generasi muda NU terhadap buku tersebut. Beberapa di antaranya adalah adanya perbedaan perspektif dan generasi muda yang menganggap buku itu terlalu reaktif terkait polemik laporan yang terbitkan oleh koran Tempo mengutip dokumen rahasia Amerika Serikat. Alih-alih buku tersebut dianggap menjadi penyuluh sejarah bagi generasi muda NU. Sebaliknya, buku itu dianggap mendiskreditkan generasi muda NU terkait opini dan langkah ideologisnya. Dari situlah kemudian muncul gejala polarisasi antara generasi tua-muda NU menyangkut sikap anti-komunis. Generasi tua lebih menolak atas gagasan rekonsiliasi, sedangkan generasi muda justru yang menjadi penggerak rekonsiliasi.

Secara historis, NU berdiri dilatarbelakangi oleh keinginan sebagian besar ulama untuk menegakkan agama, mempertahankan paham *ahlus sunnah wal jama'ah*, namun seiring berjalannya waktu NU tumbuh menjadi organisasi keagamaan yang memiliki keprihatinan pula dalam menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia (Nasionalisme).⁷ Sehingga, tidak diragukan lagi hal tersebut berimplikasi hingga sekarang, ketika ada kelompok yang berniat untuk meruntuhkan ideologi Indonesia (Pancasila), pemuda NU (GP Ansor) berada di baris terdepan menghalaunya.

Dibalik sifatnya yang dikenal dengan istilah *i'tidal dan tawasuth, tasamuh, tazawun* yakni sifat yang cenderung dinilai modertat, NU sejak berdirinya tidak pernah mentolerir segala upaya yang mengarah kepada perbuatan makar terhadap NKRI.⁸ Upaya PKI untuk mengganti pancasila dengan ideologi komunisme serta sikap sarkastis kepada ulama adalah salah satu pemantik pertentangan antara NU dan PKI di masa lalu. Sejak berdirinya pada tahun 1926 NU memang selalu berlawanan dengan PKI, terutama ketika PKI diidentikkan dengan

6 Murtadho, "NU di Masa 65 (Bagian 1) [i]."

7 Amin Farih, "Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 2 (15 Desember 2016): 251, <https://doi.org/10.21580/ws.24.2.969>.as a form of patriotism (hubb al-watan

8 Ahmad Najib Burhani, "Al-Tawassuth wa-I I'tidal The NU and Moderatism in Indonesian Islam," *Asian Journal of Social Science* 40 (2012): 564-81.

partai dengan paham atheisnya.⁹

Di tengah perjalanan NU terdapat sekelompok pemuda NU yang memberikan dukungan terhadap ide kontroversi Gus Dur ketika menjabat sebagai Presiden RI ke-4 terkait dengan pencabutan TAP MPRS/XXV/1966, meski hingga kini belum ada orang yang dapat secara pasti memastikan maksud di balik gagasan tersebut. TAP tersebut adalah aturan yang melarang sekaligus menjadi alat yang sah untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia. Eksistensi pemuda ini jika dilihat sepintas seakan-akan bertolak belakang dengan catatan sejarah NU bersama bangsa Indonesia yang berada pada garis terdepan dalam melawan komunis, sekaligus seakan-akan terdapat pergolakan antar generasi di dalam tubuh NU.

Konsepsi tentang pemuda memang memiliki banyak versi, baik itu konsepsi dalam konteks biologis yang mendefinisikan pemuda yakni seseorang yang berumur antara 15-24 tahun (konsep PBB), ataupun konsep-konsep lain yang rentangnya bisa lebih panjang dari konsep tersebut.¹⁰ Konsep pemuda dalam penelitian ini berkaitan dengan gagasan yang didukung atau disuarakan oleh mereka berbeda dengan generasi yang lebih dulu. Konsep pemuda ini kiranya tidak didasarkan pada konsepsi biologis saja, namun juga bisa diartikan secara politis.¹¹ Jika didasarkan secara biologis, maka akan terjadi kontradiksi karena tidak ada batasan usia dalam konteks biologis yang bisa mendefinisikan pemuda dalam arti gagasan yang disuarakan.

Akhirnya, secara sederhana adanya pergolakan dalam tubuh generasi muda NU sangat menarik dikaji mengingat merekalah penerus tongkat estafet dari generasi tua. Artinya, merekalah yang akan menjaga kesinambungan gerakan sosial-keagamaan NU dengan corak ideologi yang khas. Namun, jika relasi lintas generasi NU menemui tantangan tentu dapat mempengaruhi proses regenerasi ideologis yang mengarah pada timbulnya kesenjangan generasi (*generation gap*). Dinamika sejarah beserta perubahan yang menyertainya tampaknya mempengaruhi pula dialektika pemikiran lintas generasi NU. Dalam konteks perubansosial, memang ditandai oleh kegentingan hubungan generasi yang mengganggu komunikasi. Perbedaan pengalaman historis menjadi basis penting adanya peralihan dan konflik generasi.¹²

9 Greg Fealy dan Katharine McGregor, "Nahdlatul Ulama and the Killings of 1965-66: Religion, Politics, and Remembrance," *Indonesia* 89 (April 2010): 25.

10 Benjamin White dan Suzanne Naafs, "Generasi antara: refleksi tentang studi pemuda Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 1, no. 2 (2012): 89-106.

11 Ibid.

12 Abdullah, *Pemuda dan Perubahan Sosial*.

Adanya perbedaan perspektif terkait wacana anti-komunisme antara generasi muda-tua NU barangkali juga merupakan konsekuensi dari adanya transisi regenerasi yang diwarnai oleh pergolakan pemikiran sehingga besar kemungkinan terjadi transformasi ideologis dalam tubuh NU. Namun, benarkah demikian? Jika memang ada, mengapa pergolakan itu terjadi? Bagaimana konteks dan proses sosial yang melatari bergolaknya pemikiran kaum muda NU? Artikel ini berusaha menjelaskan poin-poin tersebut dengan menganalisis wacana-wacana anti-komunisme di kalangan NU lintas generasi dan formasi kognisi generasi muda NU terkait wacana tersebut.

Penelitian pada jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif yang ingin menggambarkan secara utuh realitas yang ada.¹³ Jenis analisis yang digunakan adalah analisis wacana. Namun analisis wacana pada penelitian ini tidak seperti analisis wacana yang menjadi kajian dari disiplin sastra yang hanya melihat wacana yang berkembang dengan menganalisis struktur bahasa yang digunakan dalam pembentukan wacana tersebut semata. Dalam sosiologi fokus kajian wacana tetap mengedepankan data-data primer yang didapat dari proses wawancara mendalam maupun observasi. Artinya antara sastra maupun sosiologi dalam konteks analisis wacana, mereka sama-sama melihat bagaimana wacana tersebut berkembang, namun yang membedakan diantara keduanya adalah sosiologi melihat wacana yang berkembang tidak hanya melihat pada struktur teks, namun juga memperhatikan setting sosial, maupun konteks sosial di mana wacana tersebut dibentuk. Oleh karenanya selain melihat bagaimana pewacana menyampaikan dengan struktur bahasa tertentu, sosiologi juga melihat bagaimana konteks sosial wacana tersebut dibentuk.¹⁴

Penelitian ini secara metodologis, meminjam model analisis wacana dari Van Dijk untuk melihat bagaimana pergolakan ideologi di kalangan pemuda NU dalam menyikapi wacana anti-komunisme. Van Dijk kiranya memiliki metode yang cukup komprehensif dalam menganalisa wacana seperti pada analisa wacana pada penelitian ini. Ada beberapa elemen yang dianalisis dalam model analisa wacana Van Dijk, yaitu elemen teks dengan *critical language* sebagai metodenya, kemudian elemen kognisi sosial yang mensyaratkan adanya wawancara mendalam, dan yang terakhir elemen analisa sosial yang menggunakan studi pustaka untuk mengetahui bagaimana

13 M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007).

14 Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS, 2001).

wacana yang berkembang di tengah masyarakat.¹⁵

Sejarah Pergerakan NU

NU dalam sejarah perjalanannya juga tercatat pernah terlibat langsung dalam politik praktis. Berawal dari bergabungnya NU pada MIAI (Majlisul Islam A'la Indonesia) yang didirikan oleh tokoh-tokoh pergerakan Islam seperti KH Abdul Wahab Chasbullah, KH Ahmad Dahlan, KH Mas Mansur dan dibantu oleh W. Wondoamiseno dari Syarikat Islam. Berbagai organisasi Islam ketika itu ikut bergabung dalam MIAI selain NU seperti Muhammadiyah, Syarikat Islam, Persatuan Ulama Majalengka, Al-Irsyad Surabaya, Hidayatul Islamiyah Banyuwangi, dan Al-Khoiriyah Surabaya. NU bergabung dengan MIAI pada tahun 1939, setahun setelah kongres pertama MIAI diselenggarakan. Meski terdiri dari berbagai organisasi Islam, pengaruh NU dalam MIAI cukup besar, terlebih ketika MIAI dipimpin oleh KH A. Wahid Hasyim. Di bawah kepemimpinannya, MIAI berkembang cukup pesat. Berkumpulnya beberapa organisasi Islam dalam MIAI tersebut merupakan salah satu upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.¹⁶

Di zaman Penjajahan Jepang, peran NU dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia semakin terlihat. Ketika Jepang membatasi seluruh kegiatan organisasi keagamaan dan mewajibkan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali untuk melaksanakan upacara *saikerei*, yakni upacara penghormatan terhadap kaisar Jepang Tenno Haika yang oleh pemerintah militer Jepang dianggap titisan dewa matahari. Upacara *saikerei* dilakukan dengan cara membungkuk 90 derajat (seperti ruku' ketika Shalat) menghadap ke arah Jepang. Seluruh ulama' di Indonesia menolak melakukan upacara tersebut tidak terkecuali Rais Akbar NU KH Hasyim Asyari. Tidak hanya menolak, KH Hasyim As'ari juga menyerukan kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk tidak melakukan upacara tersebut karena hukumnya haram. Karena itu KH Hasyim Asyari dan KH Mahfudz Siddiq dipenjara dan disiksa oleh Jepang meski dengan tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Dipenjara dan disiksanya dua tokoh NU tersebut membuat seluruh warga NU marah bahkan ada yang sampai melakukan pemberontakan bersenjata, namun tidak berlangsung lama bisa ditenangkan. Kemudian KH Wahab Chasbullah dan KH Wahid Hasyim pergi ke Jakarta ditemani oleh Konsul NU Jakarta Kyai Zainul

15 Ibid.

16 Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* (Surabaya: Bima Satu, 1999).

Arifin untuk melakukan upaya pembebasan kedua pimpinan NU tersebut. Seluruh Konsul NU berkumpul di Jakarta untuk membahas hal tersebut. Salah satu hasil pertemuan tersebut adalah adanya kesepakatan untuk menghadapi pemerintah militer Jepang secara lunak dan diplomatis, karena para pemimpin NU melihat bahwa kemerdekaan Indonesia hanya tinggal menunggu waktu yang tidak lama.¹⁷

Melihat perlawanan yang muncul dari warga NU dan pertemuan yang diselenggarakan oleh seluruh Konsul NU di Jakarta membuat Jepang berpikir ulang dalam memperlakukan pemimpin NU. Hal ini kemudian membuat Jepang menyesal dan khawatir kehilangan simpati rakyat Indonesia kepada Jepang. Akhirnya Pemerintah militer Jepang membebaskan KH Hasyim As'ari dan KH Mahfudz Siddiq, dan mengumpulkan seluruh pemimpin Islam untuk meminta maaf atas perlakuan pemerintah militer Jepang kepada umat Islam Indonesia. Dari sinilah kemudian para tokoh NU melihat adanya kelunakan Jepang dibanding dengan ketika masa penjajahan Belanda. NU bersedia bersinergi dengan pemerintah militer Jepang dalam pengurusan negara. Tak berselang lama NU diminta untuk masuk ke parlemen buatan Jepang dan *shumubu* (departemen agama bentukan Jepang) tingkat kepemimpinannya diserahkan kepada KH Hasyim Asy'ari. Melalui inilah peran NU dalam mempersiapkan kemerdekaan dapat diperhitungkan. NU menjalin kerjasama dengan Jepang, namun bukan berarti sikap NU yang demikian menjadikan NU seakan dibeli oleh Jepang. Di sinilah letak kekhasan NU yang di banyak kesempatan mampu untuk menempatkan diri pada posisi yang moderat. NU menjadikan lawan sebagai kawan untuk dapat mencapai kemenangan. Dalam tradisi pesantren cara demikian dikenal dengan istilah *yahannu*.¹⁸ Cara demikian terbukti berhasil, NU dibantu juga oleh Muhammadiyah mampu mengambil hati Jepang dan berhasil mendirikan sebuah wadah baru untuk perjuangan umat Islam di Indonesia melalui *Majlis Syuro Muslimin Indonesia* disingkat Masyumi. Masyumi ini kelak menjadi sebuah partai politik yang mengakomodir kepentingan umat Islam pasca kemerdekaan. Di dalam Masyumi, dulu beberapa ulama turut serta dalam upaya mengisi kemerdekaan melalui jalur politik, dan sepertinya tidak hanya berhenti sampai di Masyumi, bahkan hingga masa reformasi seperti ini beberapa ulama masih ada yang berjuang melalui jalan politik, baik itu di tingkat nasional hingga

17 Ibid.

18 Ibid.

lokal.¹⁹

Dalam catatan sejarah NU begitu menjaga jarak dengan ideologi komunisme, karena dianggap sama sekali bertentangan dengan ideologi pancasila dan juga ajaran Islam, meski tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat fakta sejarah yang menyatakan bahwa ada gerakan yang mencoba untuk mensintesakan antara ajaran Komunisme dan Islam. Pertentangan-pertentangan yang terjadi antara NU dan PKI di masa lalu adalah sebagai konsekuensi logis yang terjadi akibat berbedanya dua ideologi tersebut.

NU mendasarkan diri dalam setiap gerak sosial budaya dan politiknya atas pemahaman Aswaja (Ahlussunnah Wal Jama'ah) yang kesemuanya termaktub dalam ajaran-ajaran yang memberikan interpretasi terhadap Al-Qur'an dan Assunnah melalui yang disebut dalam tradisinya yaitu Kitab Kuning. Oleh karena itulah tidak salah ketika segala keputusan strategis NU selalu berdasar pada pendekatan fikih.²⁰ Sedangkan Komunisme, berakar dari pemikiran Karl Marx yang kemudian di kembangkan oleh Lenin yang melihat bahwa struktur sosial masyarakat penuh dengan dominasi yang dideterminasi oleh struktur ekonomi.

Baik itu NU maupun PKI, keduanya sama-sama berangkat dari upaya perjuangan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat luas, namun yang membedakan di antara keduanya adalah jika NU menjadikan kebenaran hakiki, yaitu kebenaran Tuhan sebagai sumber dari segala gerakannya, artinya NU dalam seluruh gerakannya didahului dengan penghayatan akan suprastruktur. Sedangkan PKI dengan mendasarkan diri pada pemikiran Marsisme-Leninisme, dalam pergerakannya selalu berangkat dari keadaan struktur yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, PKI menjadikan filsafat materialisme, yakni paham yang mendasarkan diri pada sifat kebendaan. Mungkin inilah yang pada akhirnya membuat antara NU dan PKI tidak menemukan titik temu setidaknya sampai pada upaya rekonsiliasi dewasa ini, Itu pun hanya upaya yang mencoba mempertemukan keduanya dalam ranah kultural, bukan dalam ranah ideologi.

Dengan mendasarkan dirinya pada hal dan ikhwal yang

19 Greg Fealy dan Robin Bush, "The Political Decline of Traditional Ulama: The State, Umma, and Nahdlatul Ulama," *Asian Journal of Social Science* 42 (2014): 536-60.

20 M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998); Abd. Halim, "Aswaja in Frames of Political Ideology and Democracy (Interpretation Aswaja in Eyes Politicians NU)," *Public Policy and Administration Research* 04, no. 09 (2014).

berkaitan dengan kebendaan, yang dapat dilihat dan disentuh oleh indera manusia, maka sudah barang tentu Komunisme sering kali dianggap tidak mempercayai adanya sesuatu yang ghoib sebagaimana yang dipercayai oleh NU. Namun anggapan bahwa komunisme tidak mempercayai adanya Tuhan ini dibantah oleh salah satu mantan wartawan *Harian Rakyat*, surat kabar yang berafiliasi dengan PKI ketika pemerintahan orde lama. Wartawan yang bernama Imam Achmad tersebut menyatakan bahwa salah ketika Komunisme terutama Komunisme di Indonesia dianggap tidak mempercayai adanya Tuhan. Sebagai buktinya Komunisme pernah menjelma di Indonesia menadi gerakan Komunisme Islam di Surakarta yang terjadi sekitar tahun 1914 sampai tahun 1942.²¹

Apa yang disampaikan oleh Imam Achmad ini ada benarnya, karena pernah terjadi pada suatu masa di Indonesia, di mana komunisme pernah bersanding mesra dengan Islam yang mana dalam pemikiran banyak khalayak antara Komunisme dan Islam selalu berada pada kutub yang berlawanan. Islam dipahami sebagai monoteisme, yang secara doktriner lebih menekankan pada aspek transendensi yang sifatnya teosentris. Sedangkan Komunisme sering dianggap sebagai kelompok yang ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan dan lebih mendasarkan diri pada filsafat materialisme yang bersifat antroposentris.

Sebagai gerakan Komunisme, gerakan komunisme di Surakarta berbeda dengan gerakan-gerakan Komunisme sebelumnya yang terlalu mengambil jarak dengan agama, misalnya gerakan komunisme yang dipimpin oleh Lenin ataupun Stalin di Rusia, dan juga gerakan Komunisme yang dipimpin oleh Mao Tse tung di Cina. Gerakan komunisme yang pernah ada di Surakarta disebut dengan Komunisme Islam yang menjadi bukti bahwa antara Komunisme dan Islam tidak selalu berkontradiktif ketika tujuan pergerakannya sama, yakni menentang kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuknya.²²

Namun apa yang terjadi antara NU sebagai kelompok Islam, dan juga PKI sebagai kelompok Komunis tidak seharmoni yang terjadi dalam sejarah pergerakan komunisme Islam yang pernah terjadi di Surakarta. Kedua organ tersebut dalam sejarahnya selalu saling membelakangi hampir dalam segala aspek, mulai dari ideologi sampai pada praktek sosial dan politik mereka.

²¹ Dirgantara Wicaksono, *Marxisme dan Kehancuran PKI* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

²² Syamsul Bakri, *Gerakan Komunisme Islam Surakarta 1914-1942* (Yogyakarta: LKiS, 2015).

Historiografi Pergolakan NU Vs Komunisme

Antara NU dan PKI secara historis tercatat bahwa mereka berhadapan-hadapan satu dengan yang lainnya baik itu secara ideologis maupun secara fisik. Bahkan Greg Fealy dengan mengutip pernyataan Martin van Bruinessen menyatakan bahwa antara NU dan Komunisme terdapat pertentangan kultural yang mendalam. Bahkan sejak didirikannya NU di tahun 1926, ia telah menyuarakan perang terhadap komunisme.²³ Secara ideologis, antara NU dan PKI ketika itu saling bertolak belakang satu sama lain. Bahkan perbedaan ideologis ini berlanjut sampai pada bentrokan fisik antara Banser sebagai kepanjangan tangan NU dengan orang-orang PKI. NU berlandaskan pada ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan dan keindonesiaan, sedangkan PKI berlandaskan pada marxisme-leninisme yang berorientasi pada nilai materialisme, dan menafikan idealisme atau keberadaan roh absolut.

Di tahun 1948 kyai-kyai NU dalam catatan sejarah menjadi korban penghilangan secara paksa dari aktivis PKI di Madiun. Ketegangan ini berlanjut di tahun 1965 sejak pecahnya aksi sepihak PKI untuk melakukan kudeta, di akar rumput ketegangan-ketegangan muncul. Antara satu warga dengan warga yang lain saling curiga. Ketidaktenangan muncul di tengah-tengah masyarakat. Para anggota banser melakukan pengejaran dan penghilangan kepada para aktivis komunisme. Begitu juga sebaliknya. Masa ini dianggap sebagai masa perang antara NU bersama TNI dengan para aktivis dan simpatisan PKI.

Pada tahun 1948, PKI melakukan pemberontakan di Madiun dan sekitarnya, ribuan santri dan ulama dibunuh, serta beberapa pesantren dan masjid turut dibakar. Pada tahun 1949 PKI melakukan pembakaran Masjid Agung Trenggalek, imam dan takmir masjid beserta jama'ah masjid tersebut disiksa. PKI menyerbu markas Brimob Jakarta Utara dan gedung Pendidikan Nasional Bogor di tahun 1951, 80 orang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. PKI juga menyerbu Masjid Agung Kembanguning Surabaya pada tahun 1962 Al-Qur'an dan kitab-kitab lainnya pada masjid peninggalan Sunan Ampel tersebut diinjak-injak dan dibakar. Tahun 1963 PKI melakukan penghinaan terhadap agama dengan mementaskan reog, ludruk serta ketoprak dengan lakon matinya Tuhan sehingga karena pertunjukkan itu, perkelahianpun tidak terelakkan. PKI melakukan aksi sepihak

23 Greg Fealy dan Katharine McGregor, "Nahdlatul Ulama and the Killings of 1965-66: Religion, Politics, and Remembrance," *Indonesia* 89 (April 2010), <https://www.jstor.org/stable/20798214>.

merebut tanah rakyat dan pemerintah sehingga terjadi pertumpahan darah, dan kalangan NU menjadi korban pada peristiwa yang terjadi pada tahun 1964 tersebut.²⁴

Rangkaian peristiwa yang melibatkan pergolakan fisik antara kelompok NU dan kelompok PKI ini menjadi catatan sejarah hingga kini. Berkaitan dengan hal tersebut dewasa ini terdapat sekelompok pemuda yang menjadi penggerak aktivitas rekonsiliasi antara NU dan orang-orang eks-Komunis. Wacana rekonsiliasi ini yang dianggap sebagai kontradiksi dan terjadi perdebatan antara kaum muda progresif dengan kalangan senior dari NU.

Habermas dan Wacana Anti Komunisme

Habermas memandang bahwa wacana sebagai medium untuk mencapai suatu tujuan kelompok/bersama. Ada syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu tersebut dapat dikatakan sebagai wacana atau diskursus. Habermas di sini bergerak dari kritiknya kepada filsafat subjek dan rasio praktis yang telah mapan sebelumnya.²⁵ Filsafat subjek dikritik oleh Habermas karena melihat subjek yang menelaah atau melihat objeknya secara monologal. Hal ini berimplikasi pada hubungan yang tidak seimbang antara subjek satu dengan subjek yang lain. Sehingga yang terjadi bukanlah konsensus seperti yang diharapkan oleh Habermas. Kritik kedua yang dilontarkan oleh Habermas ditujukan kepada rasio praktis yang sebenarnya ada di dalam filsafat subjek itu sendiri.

Rasio praktis itu sendiri merupakan dasar dari moralitas dan hukum. Konsep rasio praktis di dalamnya terdapat pemikiran bahwa subjek tindakan adalah subjek yang menimbang-nimbang secara sendirian apa yang harusnya ia lakukan.²⁶ Konsekuensi dari tindakan sendiri tersebut sudah barang tentu akan menggeser keputusan yang seharusnya diambil melalui rasio prosedural ia diambil melalui rasio praktis. Rasio demikian akan menyebabkan komunikasi yang muncul di ruang publik antar subjek bersifat monologal. Sehingga rasio praktis yang berada di dalam filsafat subjek ini tidak bisa dipertimbangkan oleh Habermas karena mereka jauh dari kata konsensus yang intersubjektif.²⁷

24 Abdul Mun'im, *Benturan NU & PKI 1948 - 1965* (Depok: Langgar Swadaya Nusantara, 2004).

25 F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang "Negara Hukum" dan "Ruang Publik" dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009).

26 Ibid.

27 Jurgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contribution to Discourse Theory of Law and Democracy* (Frankfurt, Germany: MIT Press, 1996).

Konsensus yang menjadi ciri dari wacana Habermas ini memperlihatkan bahwa antar subjek di dalam suatu ruang yang oleh Habermas disebut sebagai ruang publik ini memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan suatu pernyataan tertentu. Pernyataan yang disampaikan subjek di dalam ruang publik olehnya disebut sebagai klaim kesahihan (kebenaran). Sehingga rasio yang menggerakkan itu semua bukan lagi rasio praktis, melainkan rasio prosedural.

Begitu juga ketika dihadapkan pada wacana anti komunisme. Wacana anti komunisme ini dalam konteks Habermas adalah wacana yang dibentuk melalui rasio praktis, bukan prosedural. Rasio praktis tidak perlu memperhatikan setiap kelompok yang berkepentingan dalam hal pembentukan wacana. Ia sangat rawan diciptakan dan digunakan secara monologal. Ideologi seperti halnya agama yang cukup sensitif bagi sebagian orang atau kalangan. Meski agama bersifat absolut, monologal, dan ideologi bisa jadi tidak, mereka cukup mampu untuk mengkondisikan suatu masyarakat. Oleh karena itu menurut Habermas, sebuah wacana yang diciptakan, sebuah ideologi yang dibangun, hukum yang dirumuskan harus didasarkan pada kepentingan bersama.²⁸

Wacana Rekonsiliasi

Dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda-beda ketika bersinggungan dengan gagasan komunisme entah itu secara akademis, maupun secara praktis, biasanya akan berdampak pada sikap yang disampaikan atas rekonsiliasi tersebut. Rekonsiliasi yang diinisiasi oleh Gus Dur dan dilanjutkan oleh sekelompok yang disebut pemuda NU, seakan-akan berada di tengah lautan yang sangat luas. Banyak kemungkinan yang mungkin bisa terjadi atas rekonsiliasi ini. Ide rekonsiliasi ini pun dapat diinterpretasikan secara bermacam-macam oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tersebut, pada bagian ini akan disampaikan mengenai interpretasi-interpretasi atas wacana rekonsiliasi yang pernah digulirkan beberapa tahun yang lalu.

Rekonsiliasi Sebagai Wujud Sifat Humanis

Rekonsiliasi terhadap orang-orang yang dulu PKI, dimaknai secara berbeda-beda oleh kalangan masyarakat NU sendiri. Ada yang tidak menyetujuinya karena telah terlanjur sakit hati dengan PKI di masa lalu, ada yang sangat bersemangat agar rekonsiliasi ini

²⁸ Ibid.; Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang "Negara Hukum" dan "Ruang Publik" dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*.

dapat terwujud meski tidak dalam dimensi total sebagaimana yang diharapkan. Kalangan muda NU sangat berkeinginan agar rekonsiliasi ini dapat terwujud.²⁹

Kalangan muda NU memang seperti terbius dengan ide Gus Dur yang terlihat progresif di zamannya. Ketika banyak orang phobia dengan PKI ataupun komunisme, Gus Dur, malah berani maju ke depan untuk menyuarakan idenya tersebut. Gus Dur tidak mempedulikan apa yang akan terjadi kemudian, bahkan sampai akhirnya Gus Dur dilengserkan dari kursi Presiden RI. Rekonsiliasi yang diperjuangkannya merupakan manifestasi dari sifat humanis manusia. Setelah berpuluh-puluh tahun eks-Tapol telah dihukum sedemikian berat, baik itu antara orang-orang komunisme dan juga orang-orang NU sama-sama bersimpah darah, ketika pintu reformasi terbuka maka sudah saatnya sifat humanis ini muncul di setiap sanubari manusia. Ide ini sekaligus menjadi pintu untuk menutup rapat-rapat kegelapan di masa lalu, dan membuka selebar-lebarnya cahaya perdamaian di masa depan.

Rekonsiliasi Ekstrim

Kelompok muda ini seperti melihat ada yang janggal dari sejarah yang terukir antara NU dan Komunis. Sehingga menurut mereka perlu adanya pelurusan sejarah, atau menurut mereka perlu adanya penulisan ulang sejarah. Dengan penulisan ulang sejarah diharapkan akan terwujudnya keadilan di bangsa ini. Menurutnyanya jika memang dalam penulisan ulang sejarah itu PKI yang terbukti bersalah, maka PKI sudah mendapat ganjaran atas perbuatannya tersebut. Namun jika ada pihak lain yang ditemukan bersalah, maka perlu ada tindakan yang adil.

Menurut kelompok ini, stigmatisasi yang diberikan oleh masyarakat kepada PKI merupakan keberhasilan dari suatu propaganda besar. Sebagaimana yang telah disinggung pada bagian sebelumnya bahwa pemahaman tentang komunisme di kalangan masyarakat NU saja sangat beragam. Hal ini menunjukkan bahwa setelah masa reformasi, ketika pintu demokrasi dan informasi dibuka selebar-lebarnya, masyarakat perlahan-lahan mulai memberikan konfirmasi atas apa yang dipahami selama masa orde baru tentang PKI. Masyarakat mulai terbuka dengan informasi yang datangnya dari luar. Buku-buku yang menelaah tentang komunisme dapat ditemukan bebas di toko-toko buku. Sehingga masyarakat berada pada masa

²⁹ Imamul Huda Al Siddiq, "Wacana Rekonsiliasi NU-Komunis di Kalangan Nahdliyin Jawa Timur," Tesis (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017).

peralihan dari dogma yang memenjara ke wilayah kebebasan dalam berpikir dan berpendapat.

Tidak dapat dipungkiri pula bahwa komunisme juga memiliki andil yang cukup besar dalam usaha memerdekakan Indonesia. Kelompok komunislah yang paling radikal dalam melawan kolonialisme. Sehingga menurutnya jasa-jasa komunisme dalam melahirkan NKRI juga perlu untuk dilihat dan diberikan apresiasi meskipun seandainya dalam penulisan ulang sejarah ditemukan kesalahan komunisme dalam tragedi demi tragedi yang terjadi di masa lalu.³⁰

Rekonsiliasi yang diinginkan oleh beberapa kalangan muda NU bisa dikatakan sebagai rekonsiliasi ekstrim, rekonsiliasi progresif, menginginkan agar TAP MPR yang melarang PKI tersebut dicabut, serta Negara harus meminta maaf kepada keluarga PKI. Pendapat ini terlihat begitu ekstrim dan seperti terbawa oleh emosi. Namun, ia juga menyandingkannya dengan logika-logika yang logis seperti komunisme dewasa ini sulit untuk bangkit, anggota-anggota komunis yang lama sudah berada pada masa uzur, sehingga mustahil ia bisa menggerakkan massa untuk membangkitkan lagi komunis, orang-orang komunis sudah mendapatkan balasan yang setimpal seandainya ia salah sejak puluhan tahun lamanya, dan lain sebagainya. Dengan logika-logika seperti itu, tetap saja, Tap MPR tersebut masih berlaku, dan sekaligus masih kontroversial.

Meskipun Tap MPRS tersebut tidak jadi dicabut, ada anggapan bahwa Tap tersebut tidak akan bisa membelenggu gagasan komunisme, meski secara fisik sebenarnya komunisme telah dibelenggu. Ia melihat bahwa Tap MPRS tersebut merupakan keputusan politik sebagai senjata untuk melenyapkan lawan politik. Secara ideologis, ajaran komunisme bisa saja tetap ada, namun secara fisik ia telah lenyap.³¹

Rekonsiliasi Sebagai Gagasan Buruk

Selain terdapat kelompok-kelompok yang mendukung gagasan rekonsiliasi tersebut, namun ada pula kelompok yang dengan tegas menolaknya. Kelompok ini bukan kelompok muda NU, namun ia lebih senior dan beberapa dari mereka bisa jadi menjadi saksi sejarah pertentangan yang terjadi antara NU dan PKI. Tidak seperti kalangan NU muda, kalangan NU yang lebih senior, tidak menyetujui rekonsiliasi sebagaimana yang diinginkan oleh kalangan muda tersebut. Biasanya, latarbelakang dari NU generasi tua bermacam-macam. Ada

30 Ibid.

31 Ibid.

yang mendasarkan dirinya pada pengalamannya, ada pula yang mendasarkan argumentasinya tidak hanya pada pengalaman, namun juga pada kapasitas intelektualitasnya dalam memandang peristiwa benturan NU dan PKI.

Salah seorang informan dalam penelitian menceritakan bagaimana pengalamannya ketika masih muda dulu berhadapan langsung dengan PKI. Berasal dari keluarga seorang kyai, informan tersebut memiliki tanah pertanian yang cukup luas. Ia masih dapat mengingat betul bagaimana PKI ketika itu melakukan aksi sepihak dengan menggarap tanah orang-orang yang memiliki tanah luas termasuk tanah dari kyai tersebut. Informan merasakan betapa yang dilakukan oleh PKI ketika masa itu sudah terlewat batas. Ini kemudian yang mungkin salah satu alasan selain alasan penistaan agama oleh PKI yang membuat generasi tua NU tidak menyetujui adanya rekonsiliasi yang terlalu ekstrim tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh generasi muda NU.

Terdapat ketidaksepakatan jika rekonsiliasi itu diartikan Negara harus meminta maaf dan Tap MPRS yang melarang PKI itu dicabut. Apa yang dilakukan oleh PKI ketika masa itu merupakan suatu pemberontakan. Dalam hal ini Negara melakukan tindakan penumpasan atas pemberontakan tersebut. Dan dirasa tidak logis jika Negara harus meminta maaf kepada PKI.³²

Penutup

Berdasar pada penelitian ini dapat ditemukan bahwa kelompok muda NU mendukung gagasan Gus Dur yang ingin mengakui keterlibatan NU dalam pembantaian PKI di masa lalu, sehingga perlu dilakukannya rekonsiliasi. Mereka curiga ketika itu ada tangan-tangan yang menyetir perumusan sejarah tersebut sehingga menyebabkan wacana anti-komunisme menjadi lebih kuat dan mengakar yang mempersulit ide rekonsiliasi. Setelah sejarah tersebut ditulis kembali, mereka juga menuntut agar Negara meminta maaf kepada korban, dan yang terakhir, pencabutan TAP MPR/XXV/1966 adalah isu yang menarik menurut mereka, namun dua bagian terakhir ini terdapat perbedaan pendapat sendiri di kalangan generasi muda.

Gagasan rekonsiliasi ini disambut dengan penolakan oleh generasi tua NU. Generasi ini menganggap bahwa ide tersebut terkontaminasi oleh liberalisasi dari barat, sehingga perlu warga NU untuk berhati-hati dalam mengimplementasikannya. Penolakan ini menjadi wajar ketika melihat perbedaan latar mereka yang berbeda.

32 Ibid.

Generasi tua umumnya sangat kental dalam memegang teguh tradisi lama NU. Sedangkan generasi muda, mereka terinspirasi dari pemikiran pembaharuan Gus Dur yang tidak hanya bertumpu pada tradisi lama NU, namun mereka juga menerima pemikiran baru yang umumnya terlihat lebih liberal.

Perbedaan antara generasi tua dan generasi muda NU tersebut dalam konteks habermas merupakan indikator dari belum dapat dicapainya sebuah konsensus berkaitan dengan wacana rekonsiliasi. Menurut Habermas, wacana merupakan media untuk mencapai sebuah konsensus. Setiap hal objektif yang menjadi pembicaraan bersama masyarakat dan diarahkan untuk dicapainya sebuah konsensus, maka ia disebut sebagai wacana. Perbedaan yang terjadi antara generasi muda dan generasi tua berkaitan dengan rekonsiliasi tersebut menandakan bahwa klaim-klaim kebenaran setiap kelompok serta *lebenswelt* yang melatarbelakanginya sebagaimana konsep Habermas belum dapat bertemu satu dengan yang lainnya. Tindakan komunikatif yang terjadi antara dua kelompok tersebut masih didasari pada rasio praktis, bukan pada rasio prosedural sebagaimana yang dicita-citakan oleh Habermas. Ketika rasio prosedural menjadi dasar berpikir setiap aktor dalam tindakan komunikatifnya, kemungkinan besar wacana rekonsiliasi ini akan menemukan titik temu di antara dua kelompok yang berbeda pendapat tersebut.

Daftar Bacaan

- Abdullah, Taufik. *Pemuda dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1974.
- Alawi, Abdullah. "Buku 'Benturan NU-PKI' Jelaskan Sejarah dari Perspektif NU | NU Online." nu.or.id, 9 Desember 2013. <http://www.nu.or.id/post/read/48656/buku-quotbenturan-nu-pkiquot-jelaskan-sejarah-dari-perspektif-nu>.
- Anam, Choirul. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Surabaya: Bima Satu, 1999.
- Bakri, Syamsul. *Gerakan Komunisme Islam Surakarta 1914 - 1942*. Yogyakarta: LKiS, 2015.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Burhani, Ahmad Najib. "Al-Tawassuth wa-l I'tidal The NU and Moderatism in Indonesian Islam." *Asian Journal of Social Science* 40 (2012): 564-81.
- Bustami, Abdul Latif. *Resolusi Jihad (Perjuangan Ulama: Dari Menegakkan Agama Hingga Negara)*. Jombang: Pustaka, 2015.

- Dhani, Arman. "NU dan Rekonsiliasi 65 « IndoPROGRESS." *indoprogress.com*, 2 Agustus 2015. <https://indoprogress.com/2015/08/nu-dan-rekonsiliasi-65/>.
- Eriyanto. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Farih, Amin. "Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 2 (15 Desember 2016): 251. <https://doi.org/10.21580/ws.24.2.969>.
- Fealy, Greg, dan Robin Bush. "The Political Decline of Traditional Ulama: The State, Umma, and Nahdlatul Ulama." *Asian Journal of Social Science* 42 (2014): 536-60.
- Fealy, Greg, dan Katharine McGregor. "Nahdlatul Ulama and the Killings of 1965-66: Religion, Politics, and Remembrance." *Indonesia* 89 (April 2010): 25.
- Habermas, Jurgen. *Between Facts and Norms: Contribution to Discourse Theory of Law and Democracy*. Frankfurt, Germany: MIT Press, 1996.
- Haidar, M. Ali. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Halim, Abd. "Aswaja in Frames of Political Ideology and Democracy (Interpretation Aswaja in Eyes Politicians NU)." *Public Policy and Administration Research* 04, no. 09 (2014).
- Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang "Negara Hukum" dan "Ruang Publik" dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Islahudin. "NU Tak Terima Dicap Sebagai Pembantai PKI." *merdeka.com*, 10 Desember 2013. <https://www.merdeka.com/peristiwa/nu-tak-terima-dicap-sebagai-pembantai-pki.html>.
- Lestari, Sri. "Pro kontra permintaan maaf kepada korban tragedi 1965 - BBC News Indonesia." *bbc.com*, 27 September 2015. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150925_indonesia_lapsus_pemerintah_maaf.html.
- Masyrafina, Idealisa, dan Teguh Firmansyah. "Disebut Dokumen AS Menumpas Anggota PKI, Ini Jawaban NU." *Republika Online*, 21 Oktober 2017. <https://republika.co.id/share/oy5dfz377>.
- Mun'im, Abdul. *Benturan NU & PKI 1948 - 1965*. Depok: Langgar Swadaya Nusantara, 2004.
- Murtadho, Roy. "NU di Masa 65 (Bagian 1) [i]." *islambergerak.com*,

- 27 November 2014. <http://islambergerak.com/2014/11/nu-di-masa-65-bagian-1/>.
- Siddiq, Imamul Huda Al. "Wacana Rekonsiliasi NU-Komunis di Kalangan Nahdliyin Jawa Timur." Tesis. Surabaya: Universitas Airlangga, 2017.
- White, Benjamin, dan Suzanne Naafs. "Generasi antara: refleksi tentang studi pemuda Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 1, no. 2 (2012): 89-106.
- Wicaksono, Dirgantara. *Marxisme dan Kehancuran PKI*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.